

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. P. Parlindungan. 1999. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Mandar Maju. Bandung.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Kencana. Jakarta
- Adrian Sutedi S.H.,M.H. 2017. Sertifikat Hak Atas Tanah. Sinar Grafika. Jakarta.
- Aninda W. Rudiastuti, dkk. 2016. Deskripsi Peta Mangrove Sulawesi. Badan Informasi Geospasial. Bogor.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2004. Hak-Hak Atas Tanah. Kencana. Jakarta.
- Marihot Pahala Siahaan. 2003. Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Prakrek. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. Reforma Agraria di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rahardjo Adisasmita. 2006. Pembangunan Kelautan dan kewilayahan. Yogyakarta. Jakarta.
- Sara. La. 2014. Pengelolaan Wilayah Pesisir (Gagasan Memelihara Aset Wilayah Pesisir dan Solusi Pembangunan Bangsa). Alfabeta. Bandung.
- Soedikno Mertokusumo. 1988. Hukum dan Politik Agraria. Karunika Universitas Terbuka. Jakarta.
- Priyasmoro Yudasakti. Dkk. 2004. Mangrove Siak & Kepulauan Meranti. Energi Mega Persada. Jakarta.
- Urip Santoso. 2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Kencana. Jakarta.
- Urip Santoso. 2015. Perolehan Hak Atas Tanah. Kencana. Jakarta.
- Urip Santoso. 2015. Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Kencana. Jakarta.

dan Hadi Arnowo. 2018. Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang. Transmedia Group. Jakarta.



Peraturan Perundang-undangan

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari.

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Kendari.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 573).

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.

Karya Ilmiah

Anilda. 2015. Aspek Hukum Penguasaan Tanah Pantai Dewata oleh Masyarakat di Kabupaten Pinrang. Skripsi. Makassar.

Muhammad Ilham Arisaputra. Penguasaan Tanah Pesisir di Indonesia. Jurnal. Makassar.

Pramudji. 2004. Penanganan Hutan Mangrove Di Kawasan Pesisir Indonesia: Suatu Program yang Sangat Mendesak. Jurnal Oseana.

n Mechsans. 2012. Status Kepemilikan Tanah Pada Kawasan Pantai di Pesisir Kota Bandar Lampung. Jurnal. Universitas Lampung.



Lampiran





